

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di ASEAN 5

Jehuda Jean Sanny Mongan, Putu Mahardika Adi Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email :militia_777@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi terhadap produk domestik bruto di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan untuk melihat variabel manakah dari antara pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi yang mempengaruhi produk domestik bruto paling besar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan produk domestik bruto di negara-negara yang termasuk dalam penelitian ini, dan variabel pengeluaran pemerintah yang memiliki peranan paling besar dalam mempengaruhi produk domestik bruto.

Kata Kunci : PDB, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Inflasi.

A. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi makro ada beberapa keadaan ekonomi yang menjadi idaman kebanyakan pemerintah dan masyarakat di negara-negara di bumi ini seperti tingkat kesempatan kerja/tingkat *empoloyment* yang tinggi, peningkatan kapasitas produk nasional yang tinggi, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, keadaan perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang, dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Reksoprayitno, 2000). Namun sebagaimana yang diketahui bahwa dari tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro seperti yang disebutkan di atas ada yang usaha pencapaiannya mempunyai arah yang berlawanan satu dengan yang lainnya.

Secara umum, para pakar ekonomi menilai kinerja perekonomian makro dengan melihat beberapa variabel kunci, dan yang dianggap paling penting antara lain adalah produk domestik bruto, tingkat pengangguran dan inflasi (Samuelson, 1995) Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi juga dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil yang dicapai bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya melihat produksi dengan sarana dan prasarana yang digunakan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya

sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

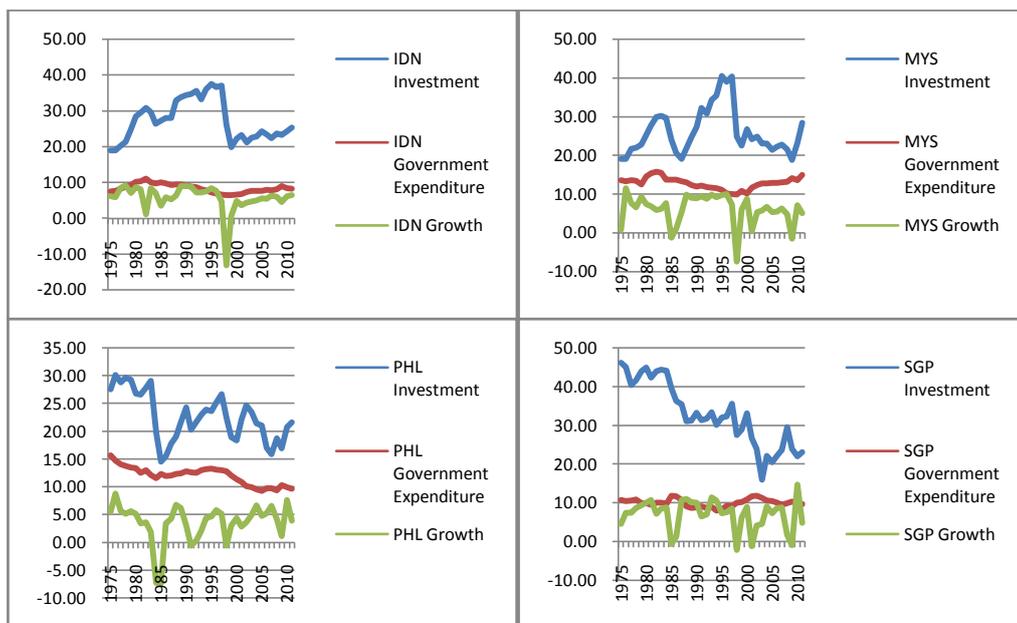
Investasi (akumulasi modal) merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investasi asing.

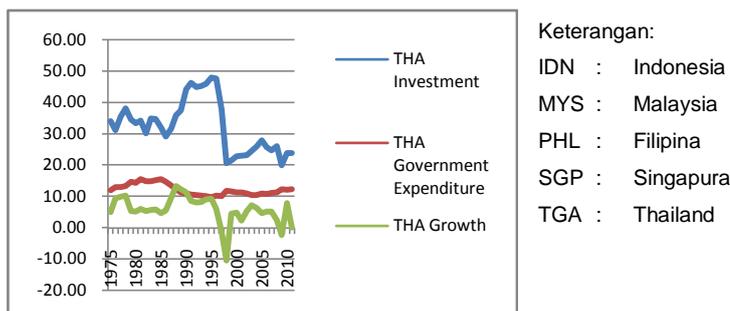
Akumulasi modal akan diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan lagi dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa depan. Pabrik-pabrik, mesin, peralatan dan bahan-bahan baru akan meningkatkan stok modal (capital stock) fisik suatu negara (yaitu total nilai riil neto dari semua barang modal produktif secara fisik) dan memungkinkan untuk meningkatkan tingkat output yang ingin dicapai. Investasi produktif secara langsung tersebut ditopang oleh investasi dalam apa yang dikenal sebagai infrastruktur sosial dan ekonomi –jalan-jalan, listrik, air dan sanitasi, komunikasi dan sebagainya– yang memfasilitasi dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi (Todaro, 2006).

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Yang menjadi perdebatan adalah seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan setiap orang berbeda dalam menilai mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung pada jasa yang pemerintah sediakan. Banyak pihak mendapat keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah.

Abdullah (2008) mengemukakan bahwa secara umum pengeluaran pemerintah di ASEAN 5 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun ada negara-negara yang mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Namun jika dibandingkan dengan presentasi pengeluaran pemerintah dari GDP, adanya pola yang beragam antara porsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Investasi terhadap PDB dan Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB di ASEAN 5 tahun 1975-2011 (dalam %)





Sumber: *World Bank* 2013, (data diolah)

Berdasarkan gambar 1 dengan data yang diperoleh dari publikasi *World Bank*, pada negara-negara ASEAN 5 peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi jelas lebih besar daripada peran pengeluaran pemerintah. Dari data tahun 1975 sampai dengan tahun 2011, Indonesia memiliki rata-rata kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB paling kecil di antara ASEAN 5 yakni 8.40%, diikuti oleh Singapura (9.99%), Filipina (12.03%), Thailand (12.16%) dan yang terakhir yaitu Malaysia sebesar 12.84%. Sementara untuk rata-rata kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Singapura menempati peringkat pertama dari negara-negara ASEAN 5 dengan kontribusi investasi sebesar 32.80% terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara kedua yang memiliki kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Thailand (32.42%) kemudian Indonesia (27.32%), Malaysia (26.12%) dan yang terakhir yaitu Filipina sebesar 22.62%.

Kestabilan harga juga merupakan salah satu tujuan dari kebijakan ekonomi makro. Pemerintah diharapkan bisa mencegah terjadinya kenaikan atau penurunan yang terjadi secara cepat pada *overall price*. Ini dikarenakan perubahan harga secara cepat dan drastis bisa mengganggu pengambilan keputusan ekonomi baik oleh perusahaan maupun individu.

Keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran, neraca pembayaran luar negeri yang terus menerus defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki bangsa manapun di bumi ini. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini usaha untuk menghilangkan atau mencegah timbulnya gejala-gejala tersebut diperlukan. Oleh karena masalah tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi agregatif dan lagi hanya dapat diatasi dengan mengendalikan jalannya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka kebijaksanaan yang diperlukan adalah kebijaksanaan ekonomi makro, dalam hal ini adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar supaya keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan (Reksoprayitno 1992).

B. KAJIAN PUSTAKA

Produk Domestik Bruto

Sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ekonomi makro, yakni peningkatan kapasitas produksi nasional atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi, maka pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, salah satu alat pengukur paling tepat untuk kapasitas produksi nasional yaitu Produk Domestik Bruto.

PDB untuk tahun tertentu dihitung dari sisi pengeluaran dengan menjumlahkan berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membeli keluaran final. Pengeluaran total pada keluaran final merupakan jumlah dari empat kategori pengeluaran yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto.

Produksi keluaran nasional menghasilkan pendapatan. Tenaga kerja harus digunakan, tanah harus disewa, dan modal harus ditanamkan. Perhitungan PDB dari sisi pendapatan menyangkut penjumlahan faktor pendapatan dan klaim lainnya pada nilai keluaran hingga

semuanya selesai dihitung. Pada garis besarnya biasa dibedakan menjadi empat unsur pembentuk pendapatan nasional yaitu upah dan gaji, sewa, bunga dan laba.

Menurut Samuelson (1995), pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan potensi PDB atau output suatu negara. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi maka harus dibandingkan antara pendapatan nasional tahun tertentu dengan tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan atas harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata terjadi disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi di masa sekarang lebih tinggi daripada yang sudah dicapai di masa sebelumnya.

Pengeluaran Pemerintah

Ungkapan lainnya yang dapat menggantikan variabel ekonomi agregatif ini antara lain ialah pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa atau *government purchase of goods and services*, yang sering juga hanya disingkat pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* yang sering disimbolkan dengan G. Dari istilah-istilah tersebut jelas bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung memperoleh balas jasa atas pengeluaran tersebut sajalah yang dapat kita masukan ke dalam kategori variabel ekonomi agregatif G. Namun pengeluaran-pengeluaran seperti pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk dan berbagai macam bantuan finansial yang diberikan kepada sektor swasta tidak dapat dimasukan kedalam kategori ini karena harus dimasukan ke dalam kategori transfer pemerintah (Reksoprayitno, 2000).

Hal senada juga diungkapkan oleh Samuelson (1995), seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membayar gaji karyawannya ditambah biaya barang yang dibeli dari industri swasta dikategorikan sebagai *government expenditure on goods and services* diluar transfer yang dilakukan pemerintah.

Investasi

Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya.

Dalam makro ekonomi, investasi diartikan sebagai penambahan terhadap aset-aset produktif seperti barang-barang modal –barang modal digunakan, dibangun atau dalam penyimpanan (inventori). Pembelian tanah sempit, rumah atau properti lain, dalam ilmu ekonomi, merupakan transaksi keuangan atau “investasi keuangan,” karena ketika seseorang membeli, orang lain berarti menjual. Oleh karena itu, investasi dalam makro ekonomi hanya ketika modal riil (real capital) terbentuk (Samuelson, 1995).

Ada tiga bentuk pengeluaran investasi. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Investasi Residensial (*residential investment*) yang mencakup perumahan baru yang dibeli penduduk untuk ditinggali dan atau yang dibeli oleh tuan tanah untuk disewakan. Investasi Persediaan (*inventory investment*) yang mencakup barang-barang yang ditempatkan di gudang oleh perusahaan, termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi, dan barang jadi.

Inflasi

Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari

harga barang-barang lain. Hal itu juga tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak dalam besaran bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tidak dapat dikatakan inflasi. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Kenaikan harga secara terus-menerus yang menyebabkan inflasi dapat disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata uang dalam negeri. Inflasi menurut teori Keynes terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan sumber ekonomi antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Dalam teori strukturalis inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi khususnya supply bahan bakar minyak, dan bahan makanan yang mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data perekonomian negara-negara dalam lingkup ASEAN 5 dalam kurun waktu 1975 hingga tahun 2010. ASEAN 5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. ASEAN 5 yang dimaksud adalah 5 negara yang mendirikan ASEAN. Dalam penelitian ini tidak dilakukan metode sampling dikarenakan secara umum akan menggambarkan keadaan negara-negara dalam lingkup ASEAN 5.

Untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, digunakan metode ekonometrika dengan alat Analisis Data Panel.

Model yang digunakan pada penelitian ini diadaptasi dari penelitian Jamzani Sodik mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah data yang digunakan adalah data dari negara-negara ASEAN 5.

Model yang akan digunakan adalah

$$\log \text{GDP} = \alpha_0 + \beta_1 \log G + \beta_2 \log \text{INV} + \beta_3 \text{Inf} + \varepsilon$$

Dimana

PDB	:	PDB riil
G	:	Pengeluaran Pemerintah
INV	:	Investasi
Inf	:	Laju inflasi
ε	:	error term

Definisi operasional dan pengukuran variabel tersebut adalah sebagai berikut:

PDB Riil

PDB riil atau juga disebut PDB konstan merupakan jumlah nilai tambah bruto dari semua produsen penduduk dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi semua subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini memakai ukuran PDB harga konstan tahun 2000 tanpa memasukkan penyusutan dan pengurangan sumber daya alam pada periode tahun 1975 sampai dengan tahun 2011. Data dinyatakan dalam satuan jutaan Dollar Amerika dan bersumber dari basis data *World Development Indicators*, *World Bank*.

Pengeluaran Pemerintah

Merupakan nilai riil dari total pengeluaran pemerintah selama satu tahun, termasuk realisasi belanja pemerintah pusat dan Anggaran Belanja untuk Daerah/ Transfer ke Daerah. Nilai

riil diperoleh dari nilai nominal peneluaran pemerintah yang disesuaikan dengan deflator pada setiap tahunnya. Data diperoleh dari publikasi *World Development Indicators*, *World Bank* dan dinyatakan dalam satuan jutaan Dollar Amerika.

Investasi

Dalam penelitian ini, investasi diprosikan sebagai pembentukan modal tetap bruto (Gross Fixed Capital Formation) yang meliputi perbaikan lahan (pagar, selokan, saluran air, dan sebagainya), pembelian pabrik, mesin, dan peralatan, dan pembangunan jalan, kereta api, dan sejenisnya, termasuk sekolah, kantor, rumah sakit, tempat tinggal perumahan swasta, dan bangunan komersial dan industri. Variabel ini diukur dengan harga konstan dengan menggunakan harga dasar tahun 2000 dalam satuan jutaan Dollar Amerika dan bersumber dari basis data *World Development Indicators*, *World Bank*.

Inflasi

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan. Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi di Indonesia dalam periode 1 tahun (year on year) dengan satuan persen. Data diperoleh dari publikasi *World Development Indicators*, *World Bank*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perekonomian ASEAN 5

Semua negara di ASEAN 5 mengalami pasang surut pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang menjadi sorotan adalah terjadi setidaknya dua kali penurunan ekonomi yang dialami semua negara ASEAN 5, yakni di tahun 1998 (krisis perekonomian yang terjadi karena Thailand melepas pertahanannya terhadap serangan spekulasi, yang kemudian menyebar ke Indonesia, Malaysia dan Filipina (ADB, 2008)) dan di tahun 2009 (dampak dari krisis global yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa).

Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai tingkat terendah yakni -13.13%, sementara Filipina meraih tingkat pertumbuhan tertinggi di tahun 1998 yakni -0.58%. Sementara kondisi pada tahun 2009 Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4.62888%, sedangkan Filipina mencatat pertumbuhan sebesar 1.14833%. Hanya Indonesia dan Filipina yang mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2009, negara ASEAN 5 lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura berada pada posisi pertumbuhan yang negatif. Di tahun 1984 dan 1991, Filipina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Mengalami kerusuhan politik, serangkaian bencana alam dan gejolak ekonomi di tahun 1984, menjadi penyebab turunnya PDB Filipina (Tolo, 2011). Devaluasi moderat pada tahun 1990-91, ditambah guncangan harga minyak akibat krisis Perang Teluk pertama membawa inflasi tahun 1990 dan 1991 (Lim, 2006). Dari gambar 4.2 terlihat juga bahwa pada tahun 2010 Singapura mencatat rekor pertumbuhan yang fantastis, pada tahun 2010 Singapura mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 14.8%, jauh melampaui negara ASEAN-5 yang lainnya.

Pertumbuhan Thailand pada tahun 2011 terlihat jatuh hampir pada titik nol. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal. Hal pertama yang mempengaruhi perekonomian Thailand adalah yang pertama adalah gempa bumi yang menghancurkan Jepang pada bulan Maret tahun 2011. Thailand terutama terpengaruh karena Jepang merupakan sumber utama dari barang modal dan teknologi canggih untuk Thailand. Di mana Jepang menyumbang lebih dari 90% dari beberapa komponen. Karena spesialisasi dan konsentrasi atas produksi hulu, pasokan rantai yang terganggu menyebabkan perlambatan produksi yang tiba-tiba. Yang kedua adalah banjir yang terjadi dimana banjir tersebut merupakan banjir yang terburuk dalam 50 tahun terakhir Sepanjang periode ini lebih dari 800 orang tewas dan jutaan warga kehilangan tempat tinggal baik atau mengungsi karena banjir yang menggenangi 66 dari 77 provinsi. Dari provinsi yang terkena banjir tersebut

terdapat manufaktur yang memproduksi mobil dan komponen elektronik. Manufaktur yang lumpuh tersebutlah yang membawa pertumbuhan PDB Thailand merosot dari 7.8% menjadi 0.1% (Alp and Elekdag, 2012).

Gambaran Variabel Pengeluaran Pemerintah di ASEAN 5

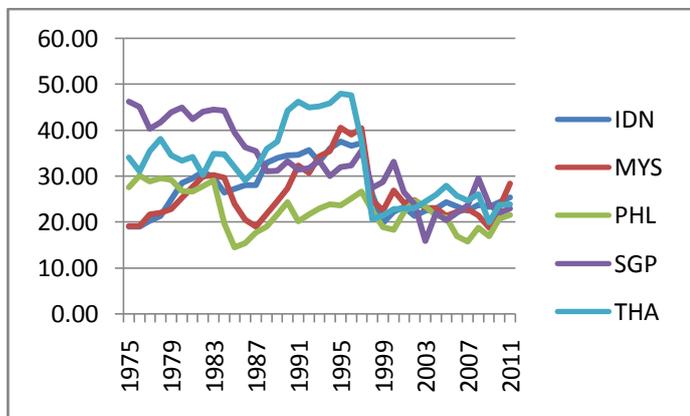
Secara rata-rata dari tahun 1975 sampai 2011, Thailand merupakan negara yang memiliki porsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP paling tinggi diantara 4 negara ASEAN 5 lainnya yakni sebesar 12.14% dengan nilai maksimum 15.62%. Malaysia berada di peringkat kedua porsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP dengan jumlah 12.80%, kemudian Filipina (11.85%), lalu Singapura (9.95%) dan yang memiliki porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB paling sedikit adalah Indonesia (8.45%).

Indonesia mencatat level paling rendah porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB di tahun 1998 dan 1999 yakni senilai 6.44%. Pengeluaran pemerintah Malaysia pada tahun 2011 melebihi apa yang telah dianggarkan, hal tersebut dikarenakan harga dari minyak dunia yang melambung tinggi, sehingga pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memberikan subsidi terhadap harga minyak yang terjadi kenaikan.

Gambaran Variabel Investasi di ASEAN 5

Investasi merupakan salah satu determinan utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk menjaga perekonomian yang kuat dan berkesinambungan. Dari gambar 2 kita dapat melihat bagaimana fluktuasi porsi investasi terhadap PDB di negara-negara ASEAN 5 dari tahun 1975 sampai 2011.

Gambar 2 Grafik Porsi Investasi terhadap PDB



Sumber: World Bank, 2013 (data diolah)

Dari gambar 2 terlihat bahwa adanya perbedaan porsi investasi terhadap PDB sebelum dan sesudah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara dan Timur pada tahun 1998 khususnya di Singapura dan di Thailand yang mengalami penurunan yang cukup besar. Sebelum krisis, rata-rata porsi investasi terhadap PDB Singapura adalah sebesar 37.43%, setelah krisis turun menjadi 24.25%, sementara Thailand juga mengalami penurunan dari 36.95% menjadi 24.06%. Tiga negara lainnya bukan tidak mengalami penurunan, hanya saja penurunan yang terjadi tidak sebesar Singapura dan Thailand. Indonesia mengalami penurunan dari 29.65% menjadi 23.03%, Malaysia turun dari 27.64% menjadi 23.32% dan Filipina yang turun menjadi 20.09% dari 23.99%.

Gambaran Variabel Inflasi di ASEAN 5

Jika dirata-ratakan dari tahun 1975 sampai 2011, maka rata-rata tingkat inflasi Indonesia adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 negara lainnya yakni sebesar 10.63% sementara tempat kedua rata-rata inflasi tertinggi ditempati oleh Filipina. Ini dikarenakan dua negara ini tercatat mengalami beberapa kali tingkat inflasi diatas 10%, dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu 58.39% (Indonesia) dan 50.34% (Filipina). Rata-rata untuk tiga negara lain masih berada dibawah 5%, antara lain Thailand (4.71%), Malaysia (3.24%) dan yang paling rendah adalah Singapura (2.35%).

Hasil Estimasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel atau pooled data. Proses estimasi variabel dari model persamaan yang telah ditetapkan menggunakan program aplikasi Eviews 5. Untuk menentukan pendekatan apa yang dilakukan dalam menggunakan data panel, diperlukan beberapa pengujian. Pengujian tersebut diantaranya Uji Chow untuk menentukan model yang akan digunakan apakah POLS atau Fixed effect dan Uji Hausman untuk menentukan model yang akan digunakan apakah Random Effect atau Fixed effect. Karena jumlah data time series yang digunakan dalam penulisan ini lebih banyak dari cross section, maka bisa langsung ditentukan metode yang digunakan adalah metode Fixed effect.

Setelah mengestimasi dengan metode fixed effect dilakukan maka didapat tentang pengaruh variabel logGE, logINV dan INF terhadap variabel logGDP dapat dilihat melalui persamaan yang terambil dari hasil estimasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Estimasi Data Panel (*Fixed effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.389143	0.267611	16.40120	0.0000
LOGGE?	0.528546	0.033658	15.70341	0.0000
INF?	0.004303	0.001068	4.031196	0.0001
LOGINV?	0.206030	0.028543	7.218314	0.0000
R-squared	0.991195	F-statistic		369.1371
Adjusted R-squared	0.988510	Prob (F-statistic)		0.000000
S.E. of regression	0.070622			

Sumber: Hasil olahan Eviews 5

Dari hasil di atas, didapati bahwa pengeluaran pemerintah (logGE) berpengaruh positif terhadap PDB, investasi (logINV) berpengaruh positif terhadap PDB, dan yang terakhir yaitu inflasi (INF) berpengaruh positif terhadap PDB. Pada saat variabel logGE, logINV dan INF bernilai nol maka logGDP adalah sebesar 4.389143. Kenaikan 1% pengeluaran pemerintah akan menaikkan PDB sebesar 0.528546%. Kenaikan 1% investasi akan menaikkan PDB sebesar 0.206030%. Dan untuk kenaikan 1% inflasi akan menaikkan PDB sebesar 0.004303%.

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap PDB di level α sebesar 1%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi mempengaruhi PDB secara positif dan signifikan. Itu berarti setiap adanya kenaikan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi, maka PDB juga akan mengalami kenaikan dengan besaran sesuai dengan koefisien masing-masing variabel tersebut.

R^2 dalam model ini didapat adalah sebesar 0.991195 artinya sebesar 99% variabel independent mampu menjelaskan model. Sedangkan f-statistik yang didapat didalam model ini sebesar 369.1371 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Dengan probabilitas sebesar 0.000000

dan lebih kecil dari α sebesar 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel dependent (pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDB.

Intercept

Koefisien intercept dalam model sebesar 4.289143 menunjukkan bahwa pada saat variabel logGE, logINV dan INF bernilai nol atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi maka pertumbuhan adalah sebesar 4.289143. dan intercept masing individual specific berbeda beda. Dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 2 **Intercept ASEAN 5**

IDN--C	0.250512
MYS--C	-0.123931
PHL--C	-0.038748
SGP--C	-0.040559
THA--C	-0.047274

Sumber: Hasil olahan Eviews 5

Untuk spesifik masing-masing negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura mempunyai hasil yang berbeda-beda pada setiap negara. Berikut adalah individual specific masing masing negara.

Indonesia

$$\log\text{GDPIDN} = 4.63965 + 0.528546\log\text{GEIDN} + 0.004303\text{INFIDN} + 0.206030\log\text{INVIDN}$$

Pada saat variabel logGE, INF dan logINV bernilai nol maka logGDP Indonesia adalah sebesar 4.63965. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah (GE) akan menaikkan GDP sebesar 0.528456. Kenaikan satu persen inflasi akan menaikkan GDP sebesar 0.004303. Sedangkan kenaikan variabel INV sebesar satu persen akan menaikkan GDP sebesar 0.206030.

Malaysia

$$\log\text{GDPMYS} = 4.26521 + 0.528546\log\text{GEMYS} + 0.004303\text{INFMYS} + 0.206030\log\text{INVMYS}$$

Pada saat variabel logGE, INF dan logINV bernilai nol maka logGDP Malaysia adalah sebesar 4.26521. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah (GE) akan menaikkan GDP sebesar 0.528456. Kenaikan satu persen inflasi akan menaikkan GDP sebesar 0.004303. Sedangkan kenaikan variabel INV sebesar satu persen akan menaikkan GDP sebesar 0.206030.

Filipina

$$\log\text{GDPPHL} = 4.25039 + 0.528546\log\text{GEPHL} + 0.004303\text{INFPHL} + 0.206030\log\text{INVPHL}$$

Pada saat variabel logGE, INF dan logINV bernilai nol maka logGDP Filipina adalah sebesar 4.25039. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah (GE) akan menaikkan GDP sebesar 0.528456. Kenaikan satu persen inflasi akan menaikkan GDP sebesar 0.004303. Sedangkan kenaikan variabel INV sebesar satu persen akan menaikkan GDP sebesar 0.206030.

Singapura

$$\log\text{GDPSGP} = 4.34858 + 0.528546\log\text{GESGP} + 0.004303\text{INFSGP} + 0.206030\log\text{INVS GP}$$

Pada saat variabel logGE, INF dan logINV bernilai nol maka logGDP Singapura adalah sebesar 4.34858. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah (GE) akan menaikkan GDP sebesar 0.528456. Kenaikan satu persen inflasi akan menaikkan GDP sebesar 0.004303. Sedangkan kenaikan variabel INV sebesar satu persen akan menaikkan GDP sebesar 0.206030.

Thailand

$$\log\text{GDPTHA} = 4.34187 + 0.528546\log\text{GETHA} + 0.004303\text{INFTHA} + 0.206030\log\text{INVTHA}$$

Pada saat variabel logGE, INF dan logINV bernilai nol maka logGDP Thailand adalah sebesar 4.63965. Kenaikan satu persen pengeluaran pemerintah (GE) akan menaikkan GDP sebesar 0.528456. Kenaikan satu persen inflasi akan menaikkan GDP sebesar 0.004303. Sedangkan kenaikan variabel INV sebesar satu persen akan menaikkan GDP sebesar 0.206030.

Hasil Estimasi dengan Standardized Coefficient

Setelah dilakukan estimasi data panel dengan menggunakan data yang sudah distandarisasi, maka kita dapat melihat variabel bebas manakah yang paling besar memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan uji pemilihan model maka ditetapkan model yang akan digunakan adalah Pooled Least Square dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel3 Hasil Estimasi Data Panel (Standardized Data)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SDZGE?	0.798531	0.026781	29.81690	0.0000
SDZINV?	0.215853	0.026144	8.256167	0.0000
SDZINF?	0.018861	0.014783	1.275866	0.2036
R-squared	0.991195			
Adjusted R-squared	0.988510			

Sumber: Hasil olahan Eviews 5

Dari tabel 3 variabel pengeluaran pemerintah yang telah distandarisasi (SDZGE) koefisien paling besar diantara tiga variabel independen yaitu sebesar 0.798531. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan produk domestik bruto.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi, didapati bahwa variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembentukan produk domestik bruto. Dan variabel independen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen produk domestik bruto adalah pengeluaran pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hussin, Habibullah, Muzafar Shah dan Siong Hook Law. 2008. Government Expenditure and Economic Growth in ASEAN-5 Economies: an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. *Journal of Yala Rajabhat University*, Vol 3 No.2 July-December 2008.
- Alexiou, Constantios. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11 (1). 1-16
- Alp, Harun dan Elekdag, Selim. 2012. Shock Terapy! What Role for Thai Monetary Policy? *IMF Working Paper*, WP/12/269
- Barro, Robert J. 1990. Government Spending in a Simple Mofel of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, Part 2
- Barro, Robert J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 106, No. 2, pp 407-443
- Gokal, Vikesh dan Hanif, Subrina. 2004. Relationship Between Inflation and Economic Growth. *Reserve Bank of Fiji*.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta. Salemba Empat.
- Lim, Joseph. 2006. Philippine Monetary Policy: A Critical Assessment and Search for Alternatives. University of Massachusetts. *Political Economy Research Institute*.
- Lipsey, Richard G., Courant, Paul N., Purvis, Douglas D. dan Steiner, Peter O. 1995. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi kesepuluh. Jakarta: Binarupa Aksara
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Principles of Ecoomics: Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1991. *Ekonomi Publik*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE.
- Ma'ruf, Ahmad dan Wihastuti, Latri. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, 44-45
- Nasir, Iqbal dan Saima, Nawaz. 2010. Investment, Inflation and Economic Growth Nexus. *Munich Personal RePEc Archive*. Paper no. 27163
- Reksoprayitno, Soediyono. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi keenam. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Reksoprayitno, Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, Edisi ketiga. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Rokhaniyah, Siti dan Nugroho, Muh.Rudi.2011. Analisis Flypaper effect pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. *100 Fokus Ekonomi (FE)*, Hal 100-113
- Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William D. 1995. *Macro Economics*. 15thed. New York: McGraw Hill.
- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Hal: 27-36
- Sodik, Jamzani dan Nuryadin, Didin. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Hal: 157-170
- Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tolo, Willa Boots J. 2011. The Determinants of Economic Growth in the Philippines: A New Look. *IMF Working Paper*.WP/11/288.